

# Peran Indonesia dalam Pergeseran Perekonomian Global

Brasukra G. Sudjana<sup>1</sup>

Perubahan-perubahan yang terjadi terhadap perekonomian dunia dan Indonesia memberikan dampak pada perubahan tata kelola perekonomian dunia. Perubahan-perubahan ini sudah dimulai dalam beberapa dekade terakhir dan dipertajam oleh krisis keuangan global yang dimulai pada tahun 2008. Dampak yang paling besar adalah adanya kebutuhan untuk menciptakan lingkungan kebijakan perekonomian dunia yang lebih inklusif dan mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang. Perubahan inilah yang sedikit banyak diakomodasi oleh Group 20 negara-negara perekonomian besar dunia, atau G20.

Secara khusus, G20 memberikan peluang bagi Indonesia untuk turut menentukan agenda ekonomi internasional, terutama dalam penanganan krisis global dan melakukan perubahan arsitektur ekonomi dunia. Selain itu, G20 memberi ruang bagi Indonesia untuk mendorong agenda-agenda pembangunan nasional di tingkat internasional. Prioritas-prioritas inilah yang tercerminkan dalam posisi yang dikedepankan oleh Indonesia dalam G20.

## Pergeseran Perekonomian Dunia

Terdapat dua pola perubahan penting yang berdampak pada peran Indonesia dalam perekonomian global. Pertama, perubahan tren jangka panjang pertumbuhan dunia, yang melihat pertumbuhan pesat negara-negara *emerging* besar, meningkatkan peran negara-negara ini dalam perekonomian dunia. Kedua, krisis keuangan global, yang dimulai pada tahun 2008, turut mempercepat tren perubahan ini. Perubahan-perubahan ini berakibat pada meningkatnya peran negara-negara berkembang dan *emerging*, termasuk Indonesia, dan adanya tekanan-tekanan untuk merubah tata kelola perekonomian global.

## ***Multipolaritas: Indonesia sebagai Salah Satu Kutub Pertumbuhan Ekonomi Dunia***

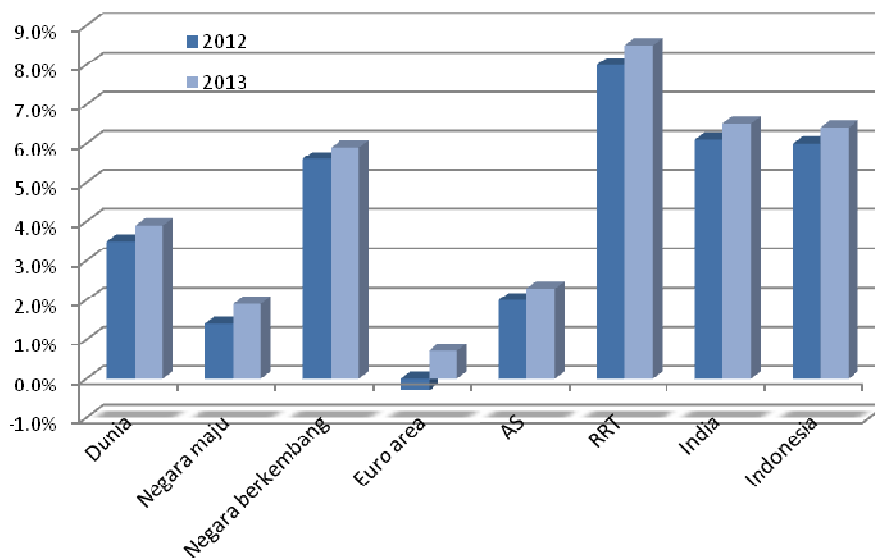
Perekonomian dunia sedang mengalami pergeseran, dengan negara *emerging* dan berkembang kini memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan global. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) kini telah menjadi perekonomian kedua terbesar dunia. Negara-negara BRICS

---

<sup>1</sup>Penulis adalah konsultan Bank Dunia; email penulis: bsudjana@worldbank.org.

(Brazil, Rusia, India, RRT, Afrika Selatan) lainnya pun turut tumbuh pesat. Indonesia sendiri telah meningkat cukup pesat dalam urutan perekonomian besar dunia. Pada tahun 2000, dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar USD 165 milyar, perekonomian Indonesia ada pada peringkat 27 dunia. Pada tahun 2011, dengan PDB sebesar USD 847 milyar, peringkat Indonesia menanjak menjadi 16 terbesar di dunia. Dalam beberapa tahun ke depan besaran perekonomian Indonesia akan mencapai USD 1 triliun, sementara beberapa analis telah memprediksi bahwa Indonesia dapat menjadi perekonomian ke-enam terbesar dunia pada tahun 2030.

**Gambar 1 – Ramalan pertumbuhan PDB dunia, 2012-2013**



Sumber: *Indonesia Economic Quarterly*, Bank Dunia, Juli 2012, untuk Indonesia; *World Economic Outlook Update*, IMF, Juli 2012, untuk yang lain.

Perdagangan dan hubungan antara negara-negara berkembang juga semakin meningkat. Sumbangan negara-negara berkembang dan *emerging* dalam total arus perdagangan dunia terus meningkat dari 26% pada tahun 1995 menjadi 42% pada tahun 2010. Perdagangan selatan-selatan (*south-south trade*) telah meningkat menjadi sepertiga dari perdagangan global. Sementara itu, investasi selatan-selatan saat ini melebihi sepertiga dari total investasi ke negara-negara berkembang<sup>2</sup>. Hal ini juga terlihat dari perubahan tujuan ekspor Indonesia, dimana Amerika Serikat dan Jepang memainkan peran yang penting pada tahun 1990, masing-masing mencakup 15% dan 45% dari total ekspor Indonesia. Sementara pada tahun 2012, tujuan ekspor

<sup>2</sup> Bank Dunia (2011).

Indonesia lebih tersebar dengan RRT menyerap 14% dari total ekspor, sementara Jepang, walaupun tetap menjadi tujuan nomor dua ekspor Indonesia, hanya menyerap 11% dari total ekspor Indonesia, diikuti oleh Amerika Serikat (10%) dan India (8%)<sup>3</sup>.

Kekuatan ekonomi global akan terus tersebar antara negara-negara maju dan berkembang. Bank Dunia, dalam laporan yang berjudul *Multipolarity: The New Global Economy*, melihat distribusi aktivitas ekonomi global yang makin tersebar sejak 1968, dan akan terus menyebar hingga tahun 2025. Dengan menggunakan pengukuran ‘kutub pertumbuhan’, yaitu perekonomian yang mana pertumbuhannya dapat menolong mendorong pertumbuhan ekonomi di negara sekitarnya dan di tingkat dunia, Bank Dunia memperkirakan Indonesia akan menjadi kutub pertumbuhan ketujuh terbesar di dunia pada tahun 2025<sup>4</sup>.

### ***Krisis Keuangan Global dan ‘the New Normal’***

Selain pola jangka panjang, krisis keuangan global, yang dimulai pada tahun 2008, turut mempertajam pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Krisis keuangan global ini dimulai dengan krisis kredit perumahan sub-prima di Amerika Serikat pada tahun 2008 dan merambat menjadi krisis perbankan dan diperburuk dengan beberapa krisis keuangan pemerintah di Eropa pada saat ini. Mohamed El-Erian, Chief Executive Officer dari perusahaan investasi PIMCO, memprediksikan perubahan ekonomi global yang diwarnai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lebih rendah di negara maju dan resiko krisis keuangan yang lebih besar. Ia menyebutkan situasi ini sebagai ‘*the new normal*’.

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia tidak lepas dari dampak krisis global ini. Pengurangan permintaan agregat di negara-negara konsumen seperti Amerika Serikat dan Eropa menyebabkan negara berkembang terkena imbas krisis melalui jalur perdagangan. Selain itu, jaringan keuangan global juga menyeret beberapa negara berkembang melalui jalur keuangan, terutama dengan penguatan regulasi dan *deleveraging* di negara-negara maju yang menyebabkan pengurangan atau penarikan dana oleh lembaga-lembaga dan sektor perbankan negara maju. Selain itu, ada tantangan dalam resesi tahun 2012 bahwa negara-negara berkembangpun akan

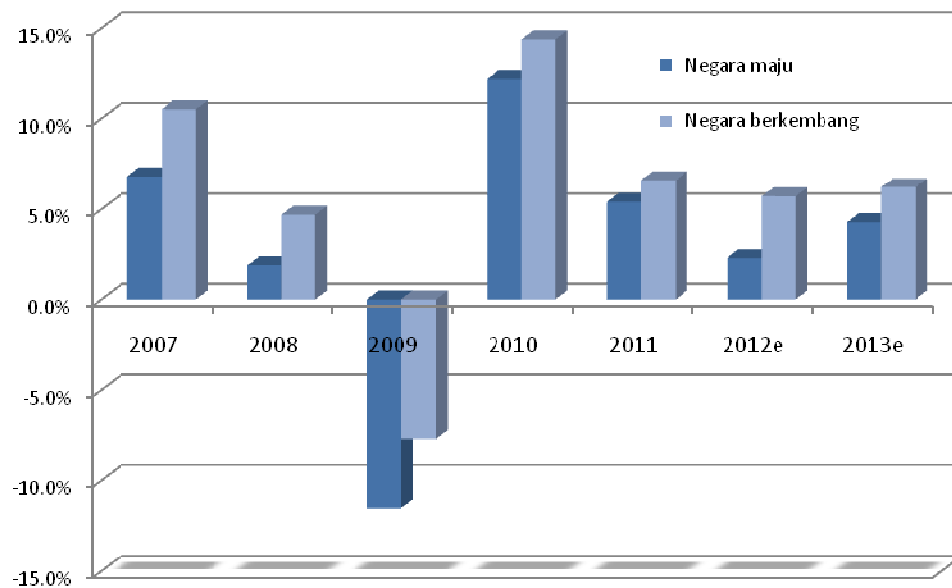
---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik*, 2 Juli 2012.

<sup>4</sup> Bank Dunia (2011).

kehabisan amunisi stimulus ekonomi dan perkiraan pertumbuhan di masa depan akan lebih rendah dibandingkan dengan dua dekade terakhir di negara-negara *emerging* besar seperti RRT dan India.

**Gambar 2 – Pertumbuhan volume ekspor barang dan jasa negara maju dan berkembang, 2007-2013**



Sumber: *World Economic Outlook*, IMF, April 2012, dan *World Economic Outlook Update*, IMF, Juli 2012.

Penurunan permintaan dunia turut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan perekonomian Indonesia, terutama pada tahun 2009 dan 2012. Hal ini dapat terlihat dari neraca berjalan Indonesia yang masuk teritori negatif pada tahun ini dan diprediksi akan tetap berada pada posisi sedikit negatif dalam beberapa tahun ke depan. Defisit ini didorong oleh lemahnya pasar ekspor Indonesia, termasuk negara-negara *emerging* di Asia, terutama RRT dan India. Selain itu, harga-harga komoditas unggulan ekspor Indonesia, seperti batu-bara (turun sekitar 30% dalam setahun terakhir) dan kelapa sawit (turun 12%) turut mengalami penurunan harga, sejalan dengan jatuhnya permintaan di pasar ekspor. Permintaan domestik yang tetap tinggi juga mengakibatkan neraca perdagangan Indonesia defisit. Dari segi keuangan, ada pula penurunan dari sumber-sumber portfolio pada tahun 2011, namun investasi langsung asing tetap cukup kuat sejak tahun 2010<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Bank Dunia (2012), hal. viii.

**Tabel 1 – Neraca pembayaran Indonesia, 2009-2013, dalam milyar USD**

|                                 | 2009        | 2010        | 2011         | 2012e        | 2013e       |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Neraca pembayaran</b>        | <b>12.5</b> | <b>30.3</b> | <b>11.9</b>  | <b>3.0</b>   | <b>10.8</b> |
| Neraca berjalan                 | 10.6        | 5.1         | 1.7          | -7.9         | -4.6        |
| <i>Perdagangan</i>              | 21.2        | 21.3        | 23.3         | 11.3         | 15.7        |
| <i>Pendapatan</i>               | -15.1       | -20.8       | -25.8        | -23.8        | -25.2       |
| <i>Transfer</i>                 | 4.6         | 4.6         | 4.3          | 4.6          | 4.8         |
| Neraca modal dan keuangan       | 4.9         | 26.2        | 14.0         | 11.3         | 15.4        |
| <i>Investasi langsung asing</i> | 2.6         | 10.7        | 10.4         | 10.4         | 10.8        |
| <i>Portfolio</i>                | 10.3        | 13.2        | 4.2          | 6.9          | 8.7         |
| <i>Lainnya</i>                  | -8.1        | 2.2         | -0.6         | -6.1         | -4.1        |
| <b>Cadangan mata uang asing</b> | <b>66.1</b> | <b>96.2</b> | <b>110.1</b> | <b>106.5</b> |             |

Sumber: Bank Indonesia dan Bank Dunia, Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia, Juli 2012, tabel 5

## **Perubahan Tata Kelola Perekonomian Internasional**

Dalam pergesaran perekonomian global ini, peran negara-negara berkembang menjadi semakin besar. Pertama, dalam multipolaritas perekonomian dunia, irisan perekonomian global turut berubah, tidak saja antara utara-selatan (negara berkembang, negara miskin, dan negara kaya), tetapi juga antara negara besar dan negara kecil. Irisan apakah yang paling penting bagi Indonesia? Apakah irisan-irisan antar negara tetap penting di masa depan? Ataukah irisan-irisan yang berbasiskan isu-isu kebijakan akan memainkan peran yang lebih penting bagi aliansi perekonomian global?

Kedua, ada tekanan untuk memperbaiki tata kelola perekonomian dunia untuk lebih mencerminkan besarnya perekonomian negara-negara berkembang. Di lain pihak, perubahan konstelasi perekonomian dunia turut membawa perubahan tanggung jawab pada negara-negara berkembang. Tanggung jawab dan peran apa yang perlu diemban oleh Indonesia sebagai salah satu negara besar berkembang? Arsitektur perekonomian internasional seperti apa yang dapat mencerminkan dinamika negara berkembang dan dinamika isu-isu kebijakan yang relevan?

## ***Irisan-irisan Baru Perekonomian Dunia***

Seiring dengan perubahan perekonomian global, aliansi-aliansi ekonomi dunia turut berubah. Walaupun perbedaan antara utara-selatan, atau antara negara kaya dan miskin, sudah

tidak lagi tepat, tidak lagi ada hanya satu irisan yang dapat mencerminkan perbedaan posisi dan kepentingan dalam perekonomian dunia. Negara-negara *emerging* besar yang tergabung dalam BRICS memiliki sedikit banyak kepentingan yang dapat bertentangan dengan kepentingan-kepentingan negara miskin maupun negara berkembang lainnya. Hal ini tercermin dalam perdebatan perdagangan di WTO (*World Trade Organisation*), perubahan iklim di UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*), maupun perdebatan yang terkait dengan ketidakseimbangan ekonomi global dan kebijakan nilai tukar di G20.

Dalam situasi seperti demikian, aliansi pragmatis yang berdasarkan isu kebijakan menjadi lebih penting dibandingkan dengan aliansi umum yang berdasarkan kategori negara. Hal ini bukan berarti Indonesia tidak memerlukan dukungan negara-negara berkembang, terutama untuk inisiatif-inisiatif yang ingin didorong oleh Indonesia. Tetapi dukungan antar negara berkembang kini bersifat spesifik, tergantung pada isu kebijakan yang ingin didorong. Semua negara akan memilih isu kebijakan yang berbeda dan sistem perekonomian global di masa depan akan menghadapi tantangan dalam merekonsiliasi isu-isu dan agenda-agenda kebijakan ini.

### ***Arsitektur Ekonomi Internasional dan Peran Negara Berkembang***

Negara berkembang kini meminta perubahan arsitektur ekonomi internasional yang mencerminkan peran dan besaran perekonomian mereka yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat, sebagai contoh, dalam reformasi tata kelola IMF yang akan memberikan suara lebih banyak pada negara-negara *emerging* yang sekarang kurang terwakili seperti RRT dan India<sup>6</sup>. Tetapi reformasi dalam lembaga inipun menghadapi tantangan dari negara-negara maju yang tidak menginginkan pengurangan pengaruh mereka. Sementara itu negara-negara kecil turut ingin mempertahankan atau meningkatkan pengaruh mereka. Di sisi lain, sebagai cerminan peran yang lebih besar, kontribusi dari negara *emerging* juga diminta untuk ditambahkan. Perlu dipikirkan bagaimana hubungan Indonesia dengan IMF di masa depan, ketika Indonesia akan menjadi perekonomian terbesar ke-enam dunia. Hal ini kemungkinan akan diwarnai dengan kuota yang lebih besar dalam IMF, namun disertai dengan ekspektasi kontribusi yang juga lebih besar.

---

<sup>6</sup> Reformasi IMF disetujui pada tahun 2008 dan 2010. Reformasi tahun 2008 menyetujui peningkatan keterwakilan negara berkembang melalui penambahan kuota untuk 54 anggota IMF, dan penambahan suara bagi negara-negara miskin. Reformasi 2010 akan menggandakan total kuota dan melakukan realokasi porsi kuota anggota IMF.

**Tabel 2 – Perubahan porsi kuota dan suara sebelum dan sesudah Reformasi IMF yang disetujui pada tahun 2008 dan 2010, dalam persen dari total kuota IMF**

|                   | Porsi kuota |                        |                        | Porsi suara |                        |                        |
|-------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
|                   | Maret 2011  | Sesudah perubahan 2008 | Sesudah perubahan 2010 | Maret 2011  | Sesudah perubahan 2008 | Sesudah perubahan 2010 |
| Negara maju       | 60.5        | 60.5                   | 57.7                   | 59.5        | 57.9                   | 55.3                   |
| Amerika Serikat   | 17.1        | 17.7                   | 17.4                   | 16.7        | 16.7                   | 16.5                   |
| EU                | 32.4        | 31.9                   | 30.2                   | 32          | 30.9                   | 29.4                   |
| Negara berkembang | 39.5        | 39.5                   | 42.3                   | 40.5        | 42.1                   | 44.7                   |
| RRT               | 3.718       | 3.996                  | 6.394                  | 3.651       | 3.806                  | 6.071                  |
| India             | 1.911       | 2.442                  | 2.751                  | 1.882       | 2.337                  | 2.629                  |
| Indonesia         | 0.955       | 0.872                  | 0.975                  | 0.947       | 0.854                  | 0.951                  |

Sumber: IMF, Juli 2012

G20 sendiri merupakan perwujudan perubahan arsitektur perekonomian global. Selain mengakomodasi negara-negara berkembang yang besar, G20 juga dicanangkan sebagai forum utama perekonomian dunia pada pertemuan puncak G20 di Pittsburgh di tahun 2010. Namun, G20 juga mengundang beberapa kritik yang mempertanyakan legitimasi forum ini, dibandingkan dengan lembaga-lembaga internasional yang resmi yang dapat mengakomodasi semua negara dan memiliki mekanisme formal dan mengikat. Kritik ini dijawab dengan menekankan efektivitas G20 dalam menghadapi krisis tahun 2008 yang membutuhkan koordinasi kebijakan yang cepat dan oleh negara-negara yang cukup besar untuk memiliki pengaruh pada perekonomian global. Kritik mengenai formalitas dan keterwakilan dalam G20 turut dijawab dengan menekankan kekuatan informalitas dalam mendapatkan konsensus politik lintas negara<sup>7</sup>. Namun demikian, G20 sendiri hanya merupakan salah satu komponen dari arsitektur perekonomian global. Forum ini dapat membahas berbagai isu yang terkait perekonomian dan pembangunan ekonomi dunia, namun lebih efektif dalam isu-isu yang terkait dengan keuangan dan ekonomi makro, seperti ketidakseimbangan global. G20 terlihat kurang efektif dalam membahas isu-isu yang memiliki rumah dalam forum atau lembaga internasional lainnya, seperti perdagangan dan perubahan iklim.

Arsitektur perekonomian global perlu mempertimbangkan beragam isu kebijakan yang memerlukan pendekatan global yang berbeda-beda. Dani Rodrik (2012) membedakan empat isu kebijakan: kebijakan yang bersifat nasional, *beggar-thy-neighbor*, *beggar-thyself*, dan *global commons*. Isu seperti kesehatan atau pendidikan tidak memerlukan banyak persetujuan

<sup>7</sup> Cameron (2011).

internasional, dan pemerintah nasional memiliki ruang kebijakan yang cukup luas. Isu yang merupakan *global commons*, seperti perubahan iklim, akan ditentukan dengan persetujuan bersama semua negara. Peran negara-negara *emerging* besar akan berbeda dengan negara-negara berkembang yang lebih kecil, maupun dengan negara-negara maju. Isu yang bersifat *beggar-thy-neighbor* mencakup kebijakan-kebijakan yang menguntungkan suatu negara dengan merugikan negara lain, sebagai contoh kebijakan nilai tukar yang sangat rendah. Isu-isu yang bersifat *beggar-thyself* adalah kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada kepentingan domestik, walaupun dapat berdampak pada negara lain; sebagai contoh, kebijakan perdagangan dan keuangan. Pemerintah nasional memiliki ruang kebijakan yang cukup luas dalam kebijakan-kebijakan ini, namun masih ada ruang untuk mengakomodasi standar persyaratan prosedural internasional seperti mekanisme pembentukan kebijakan yang terbuka, transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Di masa depan, arsitektur perekonomian dunia akan dibentuk oleh kemampuan sistem ekonomi global untuk mengakomodasi dinamika ekonomi, sosial dan politik antar negara. Dampak kebijakan (krisis) ekonomi pada keadilan sosial dan pola pertumbuhan yang inklusif, yang sedikit banyak dilupakan di negara-negara Asia pada krisis tahun 1997-1998, kini menjadi tantangan utama di Eropa. Sistem ekonomi global, bahkan di tingkat Eropa sekalipun, masih belum dapat menyelesaikan *trade-off* antara negara kreditur dan debitur dalam suatu krisis, penyelesaian dari mana memiliki dampak sosial dan politik yang sangat penting bagi negara-negara yang mengalami krisis. Tapi yang lebih penting adalah untuk mencapai mekanisme arsitektur perekonomian dunia yang adil. Negara-negara berkembang, walaupun besar dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju, masih relatif lebih miskin. Mereka akan dihadapi pada situasi dimana mereka akan diminta untuk memikul tanggung jawab lebih besar atas dampak pertumbuhan mereka terhadap perekonomian dan lingkungan global, namun dengan sumber daya dan kapasitas yang masih terbatas.

### **Peran dan Partisipasi Indonesia dalam G20: Pemulihan Perekonomian Global dan Agenda Pembangunan**

Posisi Indonesia dalam forum ekonomi internasional mencerminkan fenomena pergeseran kekuatan perekonomian dunia, perkembangan arsitektur global, dan perubahan peran

Indonesia sendiri. Perubahan-perubahan ini juga tercerminkan dalam apa yang didorong oleh Indonesia dalam G20. Posisi awal Indonesia, terutama sejak dimulainya proses Pertemuan Puncak G20 pada tahun 2008, menggambarkan antusiasme yang tinggi atas keterlibatan Indonesia dalam forum global yang sangat penting. Keanggotaan dalam G20 dianggap sebagai peluang untuk membantu reformasi arsitektur perekonomian dunia dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkelanjutan<sup>8</sup>.

Tetapi, lebih konkritnya, peluang apa yang muncul dalam partisipasi Indonesia dalam G20? Apakah partisipasi Indonesia dalam G20 cukup efektif? Agenda besar apa yang diusung oleh Indonesia?

### ***Peluang dan Partisipasi Efektif Indonesia***

Perkembangan perekonomian dunia memberikan peluang bagi Indonesia. Tanpa mengurangi sentralitas ASEAN dalam kebijakan luar negeri Indonesia, G20 mendorong Indonesia untuk memproyeksikan diri secara lebih aktif di tingkat global. Peran aktif regional Indonesia dalam ASEAN dan sebagai negara berkembang memberikan Indonesia legitimasi dalam G20. G20 juga memberikan Indonesia peluang dalam menetapkan agenda dan standar ekonomi dan keuangan internasional dan dalam mencari solusi terhadap persoalan-persoalan global. Namun peluang ini juga disertai dengan tantangan partisipasi yang efektif. Indonesia ada dalam posisi geo-ekonomi yang rentan antara kepentingan nasional, regional, dan global yang dapat bertentangan, sementara pada saat yang bersamaan harus menyeimbangkan posisi di G20 di antara negara-negara besar G7/8 dan BRICS tanpa kehilangan fleksibilitasnya.

Konteks efektifitas partisipasi Indonesia tidak lepas dari aliansi-aliansi dalam G20 yang dapat mendukung capaian agenda Indonesia dalam pertemuan puncak G20. Dalam G20, Indonesia masuk dalam suatu kelompok informal negara *emerging*. Terdapat pula koalisi-koalisi lain yang mewakili negara-negara maju (Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Jepang), Eropa/zona euro (Jerman, Perancis, Italia, Inggris, dan Uni Eropa), dan BRICS. Walaupun koalisi-koalisi ini tidak selalu memiliki agenda yang sama antar sesama anggota,

---

<sup>8</sup> Pidato Presiden Republik Indonesia di depan DPR RI dan DPD RI, 16 Agustus 2010, seperti dikutip oleh Yulius Hermawan et al (2011).

maupun konsisten dalam mendukung suatu isu kebijakan, terlihat bahwa kelompok-kelompok ini cukup efektif. Hal ini terlihat dari contoh negara-negara zona euro yang bersikeras menolak mekanisme monitoring G20 dan negara-negara BRICS yang sepakat untuk memberikan kontribusi tambahan bagi IMF. Adapula beberapa usulan untuk mendirikan kaukus negara-negara *emerging* Asia Timur yang mencakup Korea, RRT, dan Indonesia, dan dapat diperluas dengan India, Jepang, dan Australia, untuk mewakili isu-isu pembangunan dan Asia<sup>9</sup>. Selain itu adapula kepentingan-kepentingan negara-negara *emerging* ukuran sedang-besar, seperti Indonesia, Turki, Meksiko, Korea, yang dapat berbeda dengan kepentingan-kepentingan negara BRICS. Namun, seperti didiskusikan di atas (*Irisan-irisan baru perekonomian dunia*), aliansi pragmatis yang didasarkan atas isu kebijakan yang terkait mungkin memainkan peran yang lebih besar daripada aliansi lintas-negara. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menjaga fleksibilitas posisi dan mekanisme diplomasi ekonomi Indonesia.

Dari segi capaian dalam pertemuan puncak G20 di Los Cabos, Meksiko, Indonesia dinilai cukup efektif dan strategis. Hal ini terlihat dari agenda yang diusung oleh Indonesia, yang terfokus pada tiga hal: keseimbangan antara kebijakan penghematan dan penciptaan lapangan kerja, keuangan inklusif, dan pendanaan investasi infrastruktur<sup>10</sup>. Dalam tiga agenda ini Indonesia mencapai tujuan yang ditargetkan. Pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhono dinilai turut memelopori diskusi mengenai krisis di Eropa yang terus berkelanjutan dan mengangkat keterkhawatiran dunia mengenai penanganan krisis ini<sup>11</sup>. Kedua, Indonesia turut berpartisipasi dalam *Financial Inclusion Learning Program*; hal ini dapat mengedepankan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang sedang didorong di tingkat nasional. Ketiga, dengan dukungan India, Indonesia berhasil memasukkan proposal untuk inisiatif pendanaan infrastruktur dalam Deklarasi Para Pemimpin G20.

### ***Penanganan Krisis Global: ‘Middle Way’ antara Pertumbuhan Ekonomi dan Penghematan Anggaran***

Dalam krisis global pada tahun 2008 dan 2009, Indonesia turut memainkan peran dalam mitigasi krisis dengan memberikan komitmen nasional untuk stimulus ekonomi. Stimulus

---

<sup>9</sup> Young (2009).

<sup>10</sup> Wihardja (2012).

<sup>11</sup> Czuczka and Cattán (2012).

ekonomi sebesar 1,7% dari PDB, diberikan dalam bentuk penghematan dan subsidi pajak dan anggaran infrastruktur. Menurut International Labour Organisation (ILO) stimulus ekonomi ini memberikan kontribusi sebesar 30% dari lapangan pekerjaan yang diciptakan antara Februari 2009 dan Agustus 2010, atau 1,2 juta dari 3,7 juta lapangan pekerjaan<sup>12</sup>. Selain itu, stimulus ekonomi negara-negara G20, yang berkisar dari kurang 2% dari PDB sampai lebih dari 12% dari PDB, berhasil menopang pertumbuhan ekonomi global yang mengalami pertumbuhan pada tahun 2010. Namun, pada tahun 2012, G20 mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi kebijakan dalam menangani krisis yang memburuk di zona euro.

Pada pertemuan puncak Los Cabos bulan Juni 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turut mendorong adanya ‘jalan tengah’ antara pertumbuhan ekonomi dan penghematan fiskal yang tengah dilakukan oleh negara-negara maju. Hal ini tidak saja merefleksikan perdebatan kebijakan di negara-negara maju antara mereka yang menitikberatkan penghematan fiskal dalam menangani krisis dan keinginan beberapa negara lainnya yang ingin melihat pentingnya pemulihan pertumbuhan ekonomi. Namun Presiden juga mengangkat pengalaman Indonesia dalam krisis 1998-1999 yang melakukan reformasi kebijakan fiskal dan tetap menyokong pertumbuhan permintaan domestik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi<sup>13</sup>. Selain itu, Indonesia juga menjadi contoh kebijakan fiskal yang kontra-siklus, dimana negara-negara berkembang memperkuat posisi keuangan mereka pada saat *booming* antara tahun 2003-2007 dan mengeluarkan stimulus pada saat krisis 2008-2009<sup>14</sup>. Isu pemulihan perekonomian global juga diusung melalui proposal mengenai inisiatif investasi infrastruktur dalam jalur keuangan G20.

Perubahan arsitektur keuangan internasional didorong melalui reformasi dan penguatan sumber daya IMF. Indonesia mendukung reformasi tata kelola IMF yang dapat mencerminkan bobot besaran perekonomian suatu negara dan kontribusi negara-negara berkembang pada IMF. Namun, di antara negara-negara G20 dan berkembang lainnya, masih ada perbedaan pendapat dimana sebagian mendorong besaran PDB sebagai variabel utama formula kuota IMF; sementara

---

<sup>12</sup> International Labour Organisation (ILO) dan International Institute for Labour Studies (IILS) (2011), *Indonesia: Reinforcing Domestic Demand in Times of Crisis, Studies on Growth with Equity* dikutip oleh ILO dan IILS (2011), *A Review of Global Fiscal Stimulus*.

<sup>13</sup> Haswidi (2012).

<sup>14</sup> Frankel (2012).

sebagian lain ingin memperbesar porsi variabel lain, seperti keterbukaan ekonomi. Peran negara-negara berkembang juga meningkat dengan tambahan sumber daya yang dijanjikan pada pertemuan puncak Los Cabos. Dalam konteks ini, dukungan Indonesia sebesar USD 1 milyar turut berkontribusi pada peningkatan peran negara berkembang<sup>15</sup>. Walaupun jumlah ini relatif kecil (sebagai contoh, RRT akan menambahkan kontribusi mereka sebesar USD 43 milyar), tetapi hal ini memberikan nilai simbolik tersendiri. Selain itu, Indonesia turut mengukung inisiatif regional seperti Chiang Mai Initiative Multilateralised (CMIM) sebagai mekanisme pencegahan dan penanganan krisis di tingkat regional.

### ***Mengedepankan Agenda Pembangunan Nasional dan Internasional***

Di luar pengalaman menangani krisis, Indonesia menempatkan prioritas pada agenda-agenda pembangunan. Hal ini tidak saja sesuai dengan kebutuhan Indonesia, tapi juga penting dalam konteks mendorong pertumbuhan global yang lebih berkelanjutan. Agenda pembangunan utama yang diangkat oleh Indonesia termasuk pembiayaan infrastruktur, keuangan inklusif, dan ketahanan pangan (lihat artikel berikut). Pembiayaan infrastruktur sendiri masih dibutuhkan untuk mendorong pembangunan nasional dan sejalan dengan rencana-rencana pembangunan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Agenda keuangan inklusif yang didorong di G20 juga sejalan dengan penyusunan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang tidak saja diangkat di tingkat nasional, tapi juga di tingkat ASEAN. Sementara agenda ketahanan pangan sesuai dengan rencana program *Indonesia Program for International Food Security Cooperation (IPIFSC)*.

Agenda pembangunan yang didorong Indonesia juga sejalan dengan agenda pembangunan internasional. Interaksi inilah yang menjadi pendorong peran Indonesia di forum-forum ekonomi internasional lainnya. Sebagai perwakilan negara berkembang dan ASEAN, agenda-agenda pembangunan yang diangkat Indonesia juga beririsan dengan prioritas jalur pembangunan dalam G20. Sebagai contoh, Indonesia turut menandatangani *Los Cabos Declaration on Financial Inclusion*. Hal ini memperkuat agenda keuangan inklusif yang membentangi kepentingan nasional, regional (ASEAN dan APEC), dan global (G20). Hal yang

---

<sup>15</sup> Komitmen ini diberikan setelah pertemuan puncak Los Cabos.

sama dapat dikatakan mengenai pembiayaan infrastruktur. Infrastruktur sudah menjadi prioritas di ASEAN di *ASEAN Infrastructure Fund* dan dalam kelompok kerja pembangunan G20, tetapi Indonesia mendorong hal ini untuk dibahas dalam jalur keuangan untuk mengangkat peranan infrastruktur dalam pemulihan pertumbuhan global dan perbaikan keseimbangan neraca pembayaran antar negara.

### ***Implementasi: Politik Domestik dan Komitmen Internasional***

Indonesia menerima beberapa kritik terkait dengan halangan implementasi komitmen kebijakan yang berhadapan dengan realita politik nasional. Sebagai contoh, komitmen pengurangan subsidi menghadapi resistensi politik, antara lain, karena hal ini dapat mengakibatkan dampak yang lebih buruk pada masyarakat miskin daripada golongan menengah. Usaha penurunan gas rumah kaca juga berhadapan tidak saja dengan kepentingan sektor swasta, namun juga dapat berakibat pada penurunan lapangan pekerjaan di sektor-sektor yang penting bagi Indonesia. Sementara itu, komitmen menjaga keterbukaan pasar ditengarai dapat memperlambat usaha meningkatkan kapasitas industri dan tenaga kerja Indonesia.

Namun jika kedua hal ini, komitmen internasional yang tidak mengikat dan kebijakan nasional, tetap saling bertentangan, politik domestik dalam suatu demokrasi sebaiknya tetap mengambil preseden<sup>16</sup>. Ada resiko hal ini dapat mengurangi kredibilitas *engagement* Indonesia di tingkat internasional. Tetapi, tujuan internasional Indonesia tetap harus berakar pada tujuan pembangunan nasional. Yang patut dipertanyakan adalah bagaimana fleksibilitas inisiatif, komitmen, dan *engagement* internasional Indonesia dapat dijaga agar mereka dapat terus disesuaikan dengan perubahan dinamika politik domestik?

### **Penutup**

Seiring dengan pergeseran perekonomian dunia dan perubahan arsitektur global, peran Indonesia turut berubah. Kini Indonesia tidak saja perlu mengusung agenda pembangunan nasional di tingkat regional, namun Indonesia turut dapat menyerampakkan prioritas-prioritas pembangunan di tingkat global. Dengan perubahan-perubahan dalam perekonomian dunia Indonesia dituntut untuk memainkan peran yang lebih besar dalam diplomasi ekonomi

---

<sup>16</sup> Rodrik (2011).

internasional. Atas peran Indonesia dalam G20, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikutip mengatakan “*as a regional power with global outreach, the time has come for Indonesia to also ask what it can contribute to the global community*”<sup>17</sup>.

## Referensi

- Badan Pusat Statistik (2012). *Berita Resmi Statistik*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2 Juli 2012.
- Bank Dunia. (2011). *Global Development Horizons 2011. Multipolarity: The New Global Economy*. Washington, D.C.: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
- Bank Dunia. (2012). *Indonesia Economic Quarterly: Rising to present and future challenges*. Juli 2012. Jakarta: Bank Dunia.
- Cameron, David. (2011). *Governance for Growth. Building consensus for the future*. London: Prime Minister’s Office.
- Czuczka, Tony and Sandrine Rastello. (2012). “Euro Crisis Shifts to Spain as Merkel Faces G-20 Pressure.” *Bloomberg*. 19 Juni, 2012.
- El-Erian, Mohamed A. (2009). “A New Normal.” *Economic Outlook, May*. Newport Beach, CA: Pacific Investment Management Company.
- Frankel, Jeffrey. (2012). “The First World’s Fiscal Follies.” *Project Syndicate*. 19 Juli, 2012
- Haswidi, Andii. (2011). “G20 listens to SBY’s ‘middle way’.” *The Jakarta Post*. 20 Juni, 2012.
- Hermawan, Yulius P. (2011). *Peran Indonesia dalam G-20: Latarbelakang, peran, dan tujuan keanggotaan Indonesia*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung dan Departemen Hubungan Internasional Universitas Parahyangan.
- International Labour Organisation (ILO) dan International Institute for Labour Studies (IILS). (2011). *A Review of Global Fiscal Stimulus*.
- International Monetary Fund (IMF). (2012a). *World Economic Outlook*. Washington, D.C.: IMF. April, 2012.
- International Monetary Fund (IMF). (2012b). *World Economic Outlook Update*. Washington, D.C.: IMF. Juli, 2012.

---

<sup>17</sup> Suryodiningrat (2012).

- Rodrik, Dani. (2011). *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. New York: W.W. Norton & Co.
- Rodrik, Dani. (2012). "Leaderless Global Governance." *Project Syndicate*. 13 Januari, 2012.
- Suryodiningrat, Meidyatama. (2012). "SBY, legacy, and national grandeur over the Atlantic." *The Jakarta Post*, Jakarta. 18 Juni, 2012.
- Young, Soogil. (2009). "The case for an East Asian Caucus on global governance: a Korean perspective." *East Asia Forum*. 12 April, 2009.
- Wihardja, Maria Monica. (2012b). "Indonesia and the G20: a door left half open." *East Asia Forum*. 29 Juni, 2012.